



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA DESA WISATA DAN KAMPUNG TEMATIK
KOMISI X DPR RI
KE DESA PENGLIPURAN, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI
PADA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 17 S.D 19 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19*, melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata yang semula diproyeksikan akan menjadi penyumbang devisa terbesar, justru menjadi sektor yang paling terpuruk. Menghadapi kondisi pandemi saat ini, pengembangan Desa Wisata maupun Kampung Tematik, menjadi sangat penting, selain untuk menyalurkan agar sektor ini bangkit kembali, juga untuk mengikuti trend dari wisata massal (*mass tourism*) ke arah wisata alternatif (*alternative tourism*). Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR-RI, perlu melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data faktual dan penjelasan secara langsung terkait tumpang-tindih pelaksanaan Program Desa Wisata dan Kampung Tematik. Pada Rapat Internal 18 Agustus 2021, Komisi X DPR RI mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bangli, Kabupaten Maros dan Kota Malang.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 adalah untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali, terkait desa wisata, promosi desa wisata, dll, dan kemungkinan bencana alam terhadap pariwisata di Desa Wisata Penglipuran di Bangli.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bangli Provinsi Bali dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (A-185/F.PDIP).

Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Pejabat Kemenparekraf/Baparekraf RI yaitu: N. W. Giri Adnyani (Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Kemenparekraf/Baparekraf RI), Vinsensius Jemadu (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI), dan Raden Sigit Witjaksono (Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf RI).

D. Agenda Kunjungan Kerja

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI, maka metode yang digunakan antara lain:

1. Melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Kabupaten Bangli, I Wayan Diar, S.ST.Par. yang dihadiri oleh:
 - a. Sekda Kabupaten Bangli, Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Bangli, Dr. I Putu Ganda Wijaya, SSos., M.M.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, Drs. I Wayan Adnyana.
 - d. Badan Pengelola Desa Wisata Penglipuran Drs. I Nengah Moneng.
 - e. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
 - f. Ketua Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA).
 - g. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Bangli.
 - h. Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata di Kabupaten Bangli.
 - i. Pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya.
2. Tinjauan lapangan destinasi Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli dan sekitarnya.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Kondisi Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas pariwisata di Desa Wisata Kabupaten Bangli menurut Perbup Nomor 31 Tahun 2014 terdapat 31 (tigapuluh satu) Desa Wisata di Kabupaten Bangli. Dari 31 (tiga puluh satu) tersebut hanya 1 (satu) yang berstatus Desa Wisata Mandiri, yaitu Penglipuran. Yang berstatus Maju yaitu: Catur, Abang Erawang, Undisan, Guliang Kangin. Sedangkan desa yang lain masih berstatus Berkembang dan Rintisan. Desa Wisata berstatus Mandiri dan Maju telah memiliki atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang memenuhi syarat untuk menerima kunjungan wisatawan, walau masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar. Sedangkan desa wisata yang masih berstatus berkembang dan rintisan, masih perlu banyak perbaikan dan penambahan dari sisi aksesibilitas dan amenitas, dengan menggali lebih dalam atraksi dan potensi yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi: wisata agro, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, wisata spiritual, wisata sejarah.

2. Agenda dan strategi dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Bangli: sesuai Perbup Bangli Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa Wisata bahwa Pola Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bangli tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat, pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian, memberdayakan masyarakat desa wisata, memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan. Desa Wisata membentuk Badan Pengelola Desa Wisata sebagai lembaga yang mengelola kepariwisataan di desa.
3. Tujuan Pengembangan Desa Wisata antara lain: berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat dimasing-masing desa wisata, terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah, memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Biaya pengembangan desa wisata: penataan lingkungan termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan desa wisata dengan dukungan Pemerintah.
5. Hak dan kewajiban masyarakat desa wisata antara lain: masyarakat desa wisata berhak mendapatkan prioritas sebagai pelaku wisata sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan menikmati hasil dari usaha tersebut, masyarakat dan pihak lain wajib melindungi dan melestarikan lingkungan desa, Pemerintah wajib melengkapi sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pengembangan desa wisata. Meskipun transportasi umum di Bali mengalami keterbatasan, namun dengan perkembangan pariwisata, sarana akomodasi wisata memiliki banyak pilihan, baik itu travel, atau sewa pribadi.
6. Peran serta swasta dan masyarakat:
 - a. Masyarakat desa Penglipuran memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pengembangan desa wisata Penglipuran, didukung oleh lembaga adat sebagai lembaga terkuat dalam masyarakat Bali. Penglipuran telah menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia dengan berbagai penghargaan. Atraksi utama penglipuran berupa tata ruang desa dan bangunan tradisional merupakan bentuk kerjasama masyarakat melalui pola swadaya. Walaupun ada campur tangan Pemerintah dalam beberapa hal utamanya aksesibilitas jalan dan beberapa sarana penunjang, namun hal mendasar dalam 3A Penglipuran merupakan produk hasil swadaya dari hasil perkembangan pariwisata. Dengan terkenalnya Penglipuran, perusahaan dan BUMN mulai masuk untuk kegiatan CSR. Begitupula akademisi dan perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakatnya yang menysasar ke desa-desa wisata.
 - b. Pariwisata merupakan penggerak utama ekonomi Bali. Dengan berkembangnya pariwisata melalui peningkatan jumlah kunjungan menyebabkan efek domino dengan menggeliatnya sektor lain. Selain bertambahnya PAD Bangli dari retribusi wisata, ekonomi juga bergerak dengan berkembangannya ekonomi kreatif, kerajinan dan sektor UMKM. Industri pelayanan atau *hospitality* juga seiring menggeliat dengan

tumbuhnya desa wisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak muda yang memilih sekolah tinggi pariwisata untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa berperan dalam pengembangan desa wisata di daerahnya.

7. Harapan Pemda Bangli dan masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan Desa Wisata:
 - a. Selama ini Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf, rutin mengadakan pelatihan bagi pelaku pariwisata melalui kegiatan DAK Non-Fisik, kegiatan bersih-bersih, ataupun berbagai ajang lomba tematik desa wisata. Namun yang dirasakan kurang adalah pembenahan aksesibilitas maupun amenitas kepariwisataan di desa wisata. Desa wisata berkembang dan rintisan perlu banyak perhatian, khususnya pembangunan fisik.
 - b. Skema pemerintah pusat dalam penataan fisik selama ini hanya melalui DAK. DAK Kemenparekraf terbatas pada DTW ataupun lokasi prioritas, sehingga usulan, jatah ataupun penyerapannya terbatas. Kami berharap pusat dapat lebih berperan dalam penataan fisik baik itu aksesibilitas maupun amenitas pariwisata melalui berbagai kementerian melalui skema selain DAK khusus untuk desa wisata.
8. Dukungan pengembangan SDM, industri dan kelembagaan untuk desa wisata selama ini sudah berjalan baik. Sebelum pandemi, berbagai kegiatan pelatihan, bimtek ataupun sosialisasi tentang desa wisata rutin dilaksanakan. Baik oleh kementerian pariwisata dengan DAK nonfisik melalui Disparbud Bangli ataupun kegiatan lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi, perguruan tinggi di Bali maupun sector swasta atau perusahaan yang menggandeng asosiasi pariwisata.
9. Sasaran Desa Wisata dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada.
 - b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.
10. Sesuai dengan prinsip desa wisata yang berawal dari masyarakat, maka investasi untuk desa wisata diutamakan berskala kecil yang ramah lingkungan yang diutamakan berasal dari masyarakat setempat. Namun perkembangan desa wisata tidak menutup mata terhadap investasi, asalkan yang tidak bertentangan dengan nilai budaya lokal, maupun keaslian dari daya tarik desa wisata.
11. Perizinan untuk skala desa wisata merupakan skala kecil yang mengutamakan industri kreatif atau UMKM masyarakat setempat, dari sisi perizinan *online* OSS sudah sangat dipermudah. Kepemilikan status lahan dalam sebagian besar desa wisata di Bali dalam penguasaan desa adat. Ini merupakan benteng untuk memproteksi alih fungsi lahan ataupun peralihan kepemilikan lahan kepada orang luar.

B. Permasalahan dan Temuan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata antara lain:

1. Aspek pendanaan, terbatasnya PAD menyebabkan distribusi anggaran untuk pengembangan desa wisata menjadi terbatas. Solusi adalah dengan memanfaatkan dana desa yang mana dalam Undang-Undang tentang Desa sudah diatur bahwa dana tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan desa wisata. Sumber pendanaan lain adalah memanfaatkan dana CSR dari perusahaan maupun BUMN.
2. Komitmen masyarakat yang belum sepenuhnya satu kata dalam pengembangan desanya sebagai desa wisata. Diperlukan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemda maupun Perguruan Tinggi.
3. Keterbatasan sumber daya manusia masyarakat. Bagi desa wisata rintisan, masih terkendala dalam SDM yang akan mengelola Desa Wisata. Hal ini bisa secara bertahap diatasi dengan pelatihan ataupun bimbingan teknis oleh Pemda maupun akademisi dan industri pariwisata melalui CSR.
4. Potensi yang belum tergali maksimal, aksesibilitas yang belum memadai, amenities yang belum sesuai standar, paket wisata yang belum terintegrasi. Membuat paket wisata yang atraktif, pemasaran dan jaringan. Dengan membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) dan ikut dalam berbagai *networking* kepariwisataan, termasuk lomba-lomba tentang desa wisata, duplikasi atau kesamaan atraksi dengan desa wisata lainnya. Hal ini menimbulkan kebosanan bagi wisatawan sehingga diperlukan menggali autentik atau keaslian dari potensi desa tersebut.
5. Beberapa desa wisata terletak dalam jalur bahaya di sekitar Gunung Api Batur. Ini diperlukan pelatihan, kesiapan sarana, kesiapan masyarakat, aksesibilitas, amenities tentang mitigasi bencana termasuk rambu, *shelter* dan jalur evakuasi. Ini diperlukan koordinasi antara BPPD dan *stakeholder* lainnya.
6. Kendala masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata adalah kurangnya pemahaman tentang Desa Wisata, manfaat dan prinsip-prinsip dalam pengembangan Desa Wisata. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada komitmen masyarakat yang setengah hati dalam pengembangan potensi wilayahnya. Sektor swasta utamanya perusahaan dan BUMN seringkali hanya menyasar desa wisata yang sudah punya nama untuk kegiatan CSR-nya. Karena hal tersebut dirasakan keberhasilannya lebih menjamin. Jarang sekali swasta mau membina dan mengembangkan Desa Wisata dari nol.
7. Nomenklatur Kemenparekraf/Baparekraf RI saat ini sudah baik. Karena sudah bisa mengakomodir ekonomi kreatif sebagai penggerak dalam industri pariwisata. Namun permasalahan dalam bidang pariwisata Bali adalah dalam mengembangkan pariwisata budaya, dimana bidang budaya sudah menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan. Khusus untuk Bangli, Pemerintah Daerah Bangli belum mengadopsi nomenklatur Kementerian terbaru. Dinas kami masih bernama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga urusan Ekonomi Kreatif belum diakomodir.

C. Masukan dan Pandangan

1. Wakil Bupati Kabupaten Bangli, I Wayan Diar, S.ST.Par. menyampaikan beberapa catatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bangli memiliki 4 (empat) kecamatan, yaitu Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani. Bangli adalah kabupaten yang tidak memiliki pantai, sehingga tidak mengandalkan pantai sebagai tempat pariwisata, tetapi memiliki Dana Batur dan Gunung Batur yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, yang beberapa kali juga mendapat penghargaan dari UNESCO. Salah satu tempat yang menarik adalah di Trunyan, di Kecamatan Kintamani, dimana terdapat makam yang mayatnya tidak dikuburkan, karena ada pohon Taru Menyan yang wangi yang menghilangkan bau.
 - b. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang APBD dan PAD-nya paling rendah jika dibanding Kab/Kota lain di Provinsi Bali. Pariwisata merupakan kegiatan yang paling diandalkan dalam membantu pendapatan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Bangli sangat dibutuhkan.
2. Badan Pengelola Desa Wisata Penglipuran Drs. I Nengah Moneng, menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:
- a. Desa Penglipuran sebenarnya berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Penglipuran sendiri merupakan nama desa adat, bukan nama desa administratif. Desa Penglipuran tidak mendapatkan dana desa.
 - b. Asal mulai kata Desa Penglipuran, adalah Penglipuran berarti “pengeling pura” dengan “pengeling” berarti ingat dan “pura” berarti tempat leluhur. Proses menjadi desa adat berlangsung sejak tahun 1989-1990, yang diawali sebagai sebuah desa konservasi, yang memiliki 2 (dua) keunikan, yaitu keunikan budaya yang masih otentik, dan keunikan alam. Keunikan alam diantaranya adalah adanya hutan bambu. Hutan bambu yang tumbuh di Desa Adat Penglipura mempunyai luas sekitar 40 ha (sebelumnya 50 ha) dan terdiri dari 15 spesies bambu yang seluruhnya berstatus milik desa.
 - c. Sebagai desa adat, Penglipuran memiliki konsep tata ruang Tri Hita Karana (“Tri” yang berarti tiga, “Hita” yang berarti kebahagiaan dan “Karana” yang berarti penyebab). Tiga itu adalah: (1) *parahyangan* (hubungan dengan sang pencipta), *palemahan* (hubungan dengan sesama lingkungan) dan *pawongan* (hubungan dengan masyarakat).
 - d. Desa Penglipuran sebagai sebuah permukiman memiliki pola ruang yang terbagi menjadi 3 (tiga) pembagian tata ruang berdasarkan konsep Tri Mandala yang terdiri dari: *utama mandala* (pura); *madya mandala* (rumah tinggal); *nista mandala* (makam). Tata Desa ini seperti anatomi tubuh manusia. Tiap pekarangan, dibangun 2-3 rumah adat. Karena berbiaya mahal, maka ada subsidi untuk pembangunan rumah adat.
 - e. Salah satu yang unik adalah menghindari poligami. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu istri maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari karang kerti ke karang memadu (masih didalam desa tetapi bukan bagian utama). Hak dan kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran juga akan dicabut. Setelah orang tersebut pindah, maka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tetapi mereka tidak akan boleh melewati jalanan umum ataupun memasuki Pura dan mengikuti kegiatan adat.
 - f. Pada tahun 1993 turun Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 115 Tahun 1993 yang menetapkan Penglipuran sebagai Desa Tradisional. Sehingga mulai ada pengelolaan sebagai desa adat dan ada tiket masuk jika ada

wisatawan. Saat itu baru diurus oleh warga karena belum ada lembaga. Selanjutnya ada CSR dari BI yang mulai ada pendampingan dan pengelolaan dengan lebih baik.

- g. Pada 2012 ada deklarasi menjadi Desa Berbasis Masyarakat, yaitu desa yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat. Sehingga menjadi Desa Wisata yang dikelola oleh masyarakat dan ada pembekalan kepada masyarakat untuk menjalankan program desa wisata ini. Pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dengan digelarnya beberapa FGD, dan selanjutnya berkembang adanya tuntutan untuk menjadi tempat pariwisata berkelanjutan. Berkelanjutan, antara lain terkait, manajemen, lingkungan, dan sebagainya.
3. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan antara lain:
 - a. Bali sangat mengandalkan pariwisata, lebih dari 70% warganya sangat mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan. Ketika pandemi melanda, dampaknya sangat besar, terutama dengan belum dibukanya penerbangan internasional, meskipun di bandara internasional lain, sudah dibuka. Oleh karena itu, mohon Bandara Ngurah Rai segera dibuka untuk penerbangan internasional. Akibat pandemi, penurunan daya beli masyarakat juga sangat besar. Oleh karena itu, diharapkan agar pengunjung bisa tinggal disini.
 - b. Beberapa aturan terkait pandemi sebenarnya sangat membebani warga. Di saat pemasukan tidak ada, tidak ada pula pelonggaran bagi warga misalnya terkait pembayaran listrik, BPJS, kredit, dll. Seharusnya di saat pandemi yang membatasi ruang kerja warga, maka ada dispensasi bagi warga terkait kebutuhan pokoknya. Kewajiban itu bisa dilaksanakan kembali sesudah normal.
 4. Sekretaris Kemendagri/Baparekraf-RI N.W. Giri Adnyani, menyampaikan beberapa masukan bahwa klasifikasi desa wisata terdiri dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Desa Penglipuran ini merupakan desa wisata mandiri yang sudah dirintis sejak lama, sehingga dapat menjadi contoh pengembangan desa lainnya. Tri Hita Karana merupakan filosofi desa ini, dan kearifan lokal sangat dikembangkan dan menjadi pegangan dalam mengembangkan desa wisata.
 5. Komisi X DPR RI, dalam diskusi ini melalui Wakil Ketua, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Putra Nababan, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, bahwa kecenderungan wisatawan saat ini mengalami perubahan, yaitu dari wisata massal ke arah wisata alternatif mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal untuk meningkatkan wawasan, berpetualangan dan belajar. Model pelaksanaan program pengembangan desa wisata, dikerjasamakan dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang terkait mulai dari persiapan SDM, manajemen, sampai pernik-pernik yang membangun daya tarik. Banyak pihak merasa bahwa tidak ada ketidakseimbangan dan pemerataan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini. Tumpang tindih kewenangan dan kecenderungan adanya beberapa desa wisata mendapatkan terus perhatian/pendampingan/bantuan, dan ada desa yang

sama sekali tak terlirik. Komisi X DPR RI menyadari hal ini, sehingga membentuk Panja Pengawasan Desa Wisata dan Kampung Tematik.

- b. Putra Nababan menyampaikan antara lain bahwa Bali sebenarnya memiliki kemampuan untuk bangkit dengan lebih cepat. Pasca Bom Bali I dan II, kebangkitan Bali menunjukkan ketahanan dalam menghadapi kendala. Namun pada masa pandemi ini, kebangkitannya terasa lambat. Oleh karena itu ketahanan terhadap masa pandemi ini harus diperkuat. Protokol kesehatan dan menjaga agar tidak ada klaster baru sangat penting.

III. KESIMPULAN

1. Penglipuran menjadi Desa Wisata setelah melalui tahap yang sangat panjang, terutama sejak dirintisnya Penglipuran menjadi desa konservasi tahun 1989, desa tradisional 2013, dan akhirnya menjadi Desa Wisata Mandiri berbasis masyarakat pada 2012. Desa Penglipuran bukanlah administratif, namun bagian dari Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Proovinsi Bali.
2. Selain Penglipuran, beberapa desa di sekitarnya juga tengah mengembangkan diri sebagai desa wisata, antara lain Desa Catur, Abang Erawang, Undisan, Guliang Kangin, yang sudah berstatus desa wisata maju. Sedangkan desa yang lain masih berstatus Berkembang dan Rintisan.
3. Desa Wisata Penglipuran, maupun desa-desa sekitarnya, berkembang menjadi desa wisata karena konsep hidup yang selaras dengan alam yaitu Tri Hita Karana, dan memiliki keunikan budaya yang masih otentik dan keunikan alam yang masih asli.
4. Saat ini, secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Wisata Penglipuran adalah imbas dari pandemi Covid-19. Beberapa masukan tertulis yang disampaikan Lembaga Desa Adat Penglipuran antara lain:
 - (1) Selama ini Kemenparekraf/Baparekraf RI melalui kegiatan DAK Non-Fisik, lebih banyak melakukan kegiatan yang bersifat pelatihan, bersih-bersih, ataupun berbagai ajang lomba tematik desa wisata. Pembenahan aksesibilitas maupun amenitas kepariwisataan di desa wisata kurang mendapat banyak perhatian. Desa wisata berkembang dan rintisan perlu banyak perhatian, khususnya pembangunan fisik.
 - (2) Skema pemerintah pusat dalam penataan fisik selama ini hanya melalui DAK. DAK Kemenparekraf terbatas pada DTW ataupun lokasi prioritas, sehingga usulannya adalah Pemerintah Pusat dapat lebih berperan dalam penataan fisik, baik aksesibilitas maupun amenitas pariwisata melalui berbagai kementerian melalui skema selain DAK khusus untuk desa wisata.
5. Untuk mempercepat kebangkitan kembali pariwisata di Bali khususnya di desa wisata, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selain itu, perlu dukungan berupa pembukaan kembali Bandara Internasional Bali bagi kedatangan wisatawan mancanegara.

IV. REKOMENDASI.

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah maupun Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan aksesibilitas maupun amenitas fisik di Desa Wisata, khususnya

di Desa Wisata berkembang dan rintisan, disamping tetap melakukan kegiatan non-fisik seperti pelatihan maupun lomba desa wisata tematik.

2. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah maupun Pemerintah Daerah agar membuka Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, agar kegiatan pariwisata khususnya di Desa Wisata dapat bangkit kembali.

V. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi X DPR RI ke Desa Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Kabupaten Bangli, 19 September 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM.
A-185